



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 305/DJU/HM.02.3/3/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan *update* Pengisian LKE
Dan *upload* data dukung LKE

Jakarta, 10 Maret 2020

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri
(Daftar Terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengawasan Nomor 115/BP/HM.01.1/3/2020 tanggal 6 Maret 2020 hal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini diminta kepada satuan kerja Bapak/Ibu untuk melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Menginput data LKE dan upload data dukung LKE pada alamat <https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/pmpzi> sebagaimana lampiran pada surat Kepala Badan Pengawasan (terlampir).
2. Menyiapkan data dukung Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas untuk diupload yang terdiri atas :
 - a. Laporan Hasil PMPZI;
 - b. Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
 - c. Data dukung yang relevan dan terkini (*update*).
3. Penginputan data LKE dan upload data dukung LKE paling lambat tanggal 31 Maret 2020.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

PRIM HARYADI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Lampiran

Permintaan update Pengisian LKE dan Upload Data Dukung LKE
Satker yang diusulkan kembali ZI-WBK Tahun 2020

No	Nama Unit Kerja	Tipe/Kelas Pengadilan
1	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	Pengadilan Tingkat Banding
2	Pengadilan Tinggi Bengkulu	Pengadilan Tingkat Banding
3	Pengadilan Tinggi Gorontalo	Pengadilan Tingkat Banding
4	Pengadilan Tinggi Jayapura	Pengadilan Tingkat Banding
5	Pengadilan Tinggi Kupang	Pengadilan Tingkat Banding
6	Pengadilan Tinggi Manado	Pengadilan Tingkat Banding
7	Pengadilan Tinggi Mataram	Pengadilan Tingkat Banding
8	Pengadilan Tinggi Padang	Pengadilan Tingkat Banding
9	Pengadilan Tinggi Palangka Raya	Pengadilan Tingkat Banding
10	Pengadilan Tinggi Palembang	Pengadilan Tingkat Banding
11	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	Pengadilan Tingkat Banding
12	Pengadilan Tinggi Pontianak	Pengadilan Tingkat Banding
13	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	Pengadilan Tingkat Banding
14	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Pengadilan Tingkat Banding
15	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	Pengadilan Tingkat Banding
16	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	Kelas I A Khusus
17	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Kelas I A Khusus
18	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Kelas I A Khusus
19	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	Kelas I A Khusus
20	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	Kelas I A Khusus
21	Pengadilan Negeri Makassar	Kelas I A Khusus
22	Pengadilan Negeri Medan	Kelas I A Khusus
23	Pengadilan Negeri Palembang	Kelas I A Khusus
24	Pengadilan Negeri Semarang	Kelas I A Khusus
25	Pengadilan Negeri Sidoarjo	Kelas I A Khusus
26	Pengadilan Negeri Ambon	Kelas I A
27	Pengadilan Negeri Bale Bandung	Kelas I A
28	Pengadilan Negeri Balikpapan	Kelas I A
29	Pengadilan Negeri Banda Aceh	Kelas I A
30	Pengadilan Negeri Banjarmasin	Kelas I A
31	Pengadilan Negeri Banyuwangi	Kelas I A
32	Pengadilan Negeri Gresik	Kelas I A
33	Pengadilan Negeri Jambi	Kelas I A
34	Pengadilan Negeri Kendari	Kelas I A
35	Pengadilan Negeri Klaten	Kelas I A
36	Pengadilan Negeri Malang	Kelas I A
37	Pengadilan Negeri Manado	Kelas I A
38	Pengadilan Negeri Mataram	Kelas I A
39	Pengadilan Negeri Padang	Kelas I A
40	Pengadilan Negeri Pati	Kelas I A
41	Pengadilan Negeri Pontianak	Kelas I A
42	Pengadilan Negeri Samarinda	Kelas I A
43	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	Kelas I A
44	Pengadilan Negeri Tanjungpinang	Kelas 1 A
45	Pengadilan Negeri Bau-Bau	Kelas I B
46	Pengadilan Negeri Bitung	Kelas I B
47	Pengadilan Negeri Blora	Kelas I B
48	Pengadilan Negeri Demak	Kelas I B
49	Pengadilan Negeri Depok	Kelas I B

50	Pengadilan Negeri Kepanjen	Kelas I B
51	Pengadilan Negeri Metro	Kelas I B
52	Pengadilan Negeri Singkawang	Kelas I B
53	Pengadilan Negeri Situbondo	Kelas I B
54	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar	Kelas I B
55	Pengadilan Negeri Temanggung	Kelas I B
56	Pengadilan Negeri Tondano	Kelas I B
57	Pengadilan Negeri Tulungagung	Kelas I B
58	Pengadilan Negeri Kayuagung	Kelas II
59	Pengadilan Negeri Kuala simpang	Kelas II
60	Pengadilan Negeri Langsa	Kelas II
61	Pengadilan Negeri Masohi	Kelas II
62	Pengadilan Negeri Mempawah	Kelas II
63	Pengadilan Negeri Pare-pare	Kelas II
64	Pengadilan Negeri Praya	Kelas II
65	Pengadilan Negeri Sekayu	Kelas II
66	Pengadilan Negeri Sengeti	Kelas II
67	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang	Kelas II
68	Pengadilan Negeri Soasiu	Kelas II
69	Pengadilan Negeri Tilamuta	Kelas II



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 13011
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

Jakarta, 06 Maret 2020

Nomor : 115/BP/HM.01.1/3/2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permintaan *update* Pengisian LKE dan *upload* data dukung LKE

Yth.

1. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan;

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 316/SEK/OT.01.1/2/2020 tanggal 17 Februari 2020 Hal Permintaan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Terhadap Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat 114 (seratus empat belas) unit kerja yang belum lolos memperoleh predikat WBK tahun 2019. Terhadap unit kerja tersebut dilakukan *desk evaluation* secara bertahap;
2. Guna mengaktifkan kegiatan *desk evaluation* tersebut, diharapkan kepada 114 unit kerja tersebut segera menyiapkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) berupa:
 - a. Laporan Hasil PMPZI;
 - b. Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
 - c. Data Dukung yang relevan dan terkini (*update*);
3. Seluruh dokumen tersebut segera disampaikan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui <https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/pmpzi> paling lambat 31 Maret 2020.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI


Nugroho Setiadji

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Para Inspektur Wilayah Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.